

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Majalah

- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. (2017). *Kebijakan Kenaikan Cukai dan Harga Rokok sebagai Instrumen Pengendali Prevalensi Perokok di Indonesia*. Jakarta: Pusat Kebijakan Pendapatan Negara.
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. (2018). *Policy Paper: Peningkatan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Indonesia yang Lebih Sehat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2018). *Laporan Pengelolaan DBH CHT Tahun 2018*. Jakarta : Kementerian Keuangan RI.
- Lian, Tan Yen, dan Ulysses Dorotheo. (2018). *The Tobacco Control Atlas: ASEAN Region, Fourth Edition*. Thailand: SEATCA.
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2012). *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ke Tiga*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Tangkulung, Lucky R, dkk. (2017). *UU No.39/2007 Semangat Reformasi di Bidang Cukai*. Jakarta: Warta Bea Cukai. (Oktober 2007)
- Tim FTCT Warrior. (2018). *Katalog Harga Rokok Rokok Murah Anomali yang Melahirkan Dekadensi Generasi Penerus Bangsa*. Jakarta: Yayasan Lentera Anak.
- Tobacco Control Support Center (TCSC) - IAKM. (2014). *Fakta Tembakau dan Permasalahannya, Edisi V, Tahun 2014*. Jakarta: Kemenkes RI. 2014.

Sumber Jurnal, Skripsi, Paper

- Ahsan, Abdillah. (2017). *Inovasi Pendanaan Defisit Program JKN-KIS melalui Pungutan Tambahan atas Rokok untuk Kesehatan (PRUK)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Bima, Aditya . (2014). *Pendapatan Negara*. Depok : STAN.
- Chaloupka FJ, Cummings KM, Morley C, Horan J. (2010). Tax, Price and Cigarette Smoking: Evidence from the Tobacco Documents and Implications for Tobacco Company Marketing Strategies. *Tobacco Control*, 11(Suppl I): i62–i72.

- Hasan F, Darwanto H. (2016). Prospek dan Tantangan Usahatani Tembakau Madura. *SEPA Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 10 (1): 63-70.
- Maya, Deacy dan Azhari Aziz Samudra. (2013). *Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai dan Penyesuaian Batasan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau (Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 179/PMK.011/2012)*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
- Rasyid, Mohtar, dan Henny Oktavianti. (2017). *Dilema Produk Tembakau di Era Globalisasi: Studi Komparatif Rokok Indonesia dalam Lingkup ASEAN*. Madura: Universitas Trunojoyo.
- Santoso, Riyadi. (2016). Dilema Kebijakan Pengendalian Tembakau di Indonesia. *Jurnal Kajian*, 21(3): 201-219.
- Suprihanti, Antik, dkk. (2019). Dampak Kebijakan Cukai Rokok terhadap Distribusi Surplus Ekonomi Industri Rokok di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 37(1): 1-23.
- Triono, Doni. (2017). Analisis Dampak Tarif Cukai Hasil Tembakau terhadap Penerimaan Negara dan Produksi Tembakau Domestik. *Jurnal Pajak Indonesia*, 1(1): 124-129.
- Surjono, Welly. (2016). Peranan Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4 (1): 853-866.

Sumber Website

- Admin Web Bea dan Cukai. (2011). Pengertian Kawasan Pabean. Diakses 13 Mei 2020 dari <https://www.beacukai.go.id/faq/pengertian-kawasan-pabean.html>.
- Admin Web Bea dan Cukai Malang. (2014). *Sosialisasi Perubahan Tarif Cukai Hasil Tembakau pada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang*. Diakses 1 April 2020 dari <http://www.beacukaimalang.com/media/berita-terkini/sosialisasi-perubahan-tarif-cukai-hasil-tembakau-pada-kppbc-tipe-madya-cukai-malang/>.
- Admin Web Kemenkeu. (2015). *Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Tahun 2016*. Diakses 1 April 2020 dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-lama/kebijakan-tarif-cukai-hasil-tembakau-Tahun-2016/>.
- Admin Web Bea dan Cukai. (2016). *Melalui Kebijakan Cukai 2017, Pemerintah Tingkatkan Kepedulian akan Kesehatan, Kesempatan Kerja, dan Pembangunan Nasional*. Diakses 1 April 2020 dari <https://www.beacukai.go.id/berita/melalui-kebijakan-cukai-2017->

pemerintah-tingkatkan-kepedulian-akan-kesehatan-kesempatan-kerja-dan-pembangunan-nasional.html.

Admin Web Bea dan Cukai. (2017). *Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Tahun 2018*. Diakses 1 April 2020 dari <https://www.beacukai.go.id/berita/kebijakan-cukai-hasil-tembakau-Tahun-2018.html>.

Admin Web Bea dan Cukai. (2020). *Tarif Cukai Hasil Tembakau Naik*. Diakses 1 April 2020 dari <https://www.beacukai.go.id/berita/tarif-cukai-hasil-tembakau-naik.html>.

Badan Kebijakan Fiskal. (2020). Diakses 24 Maret 2020 dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *KBBI Daring*. Diakses 03 April 2020 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/OLIGOPOLI>.

Bea Cukai. (2011). *Tugas Pokok dan Fungsi*. Diakses 29 Maret 2020 dari <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>.

Bea Cukai Kediri. (2017). *Artikel Bea Cukai Kediri*. Diakses 20 April 2020 dari <http://beacukai-kediri.com/artikel.php?judul=Fungsi>.

Bea Cukai Kediri. (2017). *Sejarah KPPBC TMC Kediri*. Diakses 7 April 2020 dari <http://beacukaikediri.com/artikel.php?judul=Sejarah%20KPPBC%20TMC%20Kediri>.

Oknews. (2018). *Luar Biasa, Trilyunan Hasil Bea Cukai Kediri*. Diakses 14 April 2020 dari <https://oknews.co.id/luar-biasa-trilyunan-hasil-bea-cukai-kediri/>.

Chusna, Asmaul. (2018). *Realisasi Penerimaan Cukai di Kediri Lebih dari Rp16,97 Triliun*. Diakses Pada 14 April 2020 dari <https://jatim.antaranews.com/berita/248480/realisasi-penerimaan-cukai-di-kediri-lebih-dari-rp1697-triliun>.

Chusna, Asmaul. (2019). *Penerimaan Bea Cukai Kediri Melebihi Target*. Diakses 14 April 2020 dari <https://jatim.antaranews.com/berita/276219/penerimaan-bea-cukai-kediri-melebihi-target>.

Chusna, Asmaul. (2020). *Penerimaan Bea Cukai Kediri pada 2019 Lampau Target*. Diakses 14 April 2020 dari <https://jatim.antaranews.com/berita/344852/penerimaan-bea-cukai-kediri-pada-2019-lampau-target>.

Harsono, Fitri Haryanti. (2019). *Proyeksi Defisit BPJS Kesehatan Tahun 2019 Capai Rp32 Triliun*. Diakses 15 April 2020 dari

<https://www.liputan6.com/health/read/4081180/proyeksi-defisit-bpjs-kesehatan-Tahun-2019-capai-rp32-triliun#> .

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2020). Diakses 30 April 2020 dari <https://www.pertanian.go.id/home/?show=page&act=view&id=61Keterangan>.

IDX. (2020). *Financial report PT Gudang Garam Tbk. Tahun 2016-2019*. Diakses 9 April 2020 dari <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-Tahunan/>.

Kemenkeu RI. (2020). APBN 2020. Diakses 29 Maret 2020 dari <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2020/>.

Numbeo. (2016). *Rokok Indonesia Termasuk Termurah di Asia*. Diakses 03 April 2020 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/11/rokok-indonesia-termasuk-termurah-di-asia>.

Rahardjo, Mudjia. (2010). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Diakses 12 Mei 2020 dari <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.

Sumardi, Edi. (2020). *Lengkap, Harga Rokok di 2020 Semua Merek: Marlboro, Djarum, Gudang Garam, Sampoerna, Dji Sam Soe*. Diakses 29 April 2020 dari <https://makassar.tribunnews.com/2020/01/03/lengkap-harga-rokok-di-2020-semua-merek-marlboro-djarum-gudang-garam-sampoerna-dji-sam-soe?page=all>.

Surono. (2019). *Filosofi Cukai*. Diakses 5 April 2020 dari <https://klc.kemenkeu.go.id/pusbc-filosofi-cukai/>.

Putra, Dwi Aditya. (2020). *Berkat Rokok, Kinerja Penerimaan Bea Cukai 2019 Tembus Rp213 Triliun*. Diakses 30 Maret 2020 dari <https://www.merdeka.com/uang/berkat-rokok-kinerja-penerimaan-bea-cukai-2019-tembus-rp-213-triliun.html>.

Morningstar&Coinbase. (2020). Kurs Dollar Hari Ini. Diakses 3 April 2020 dari <https://kursdollar.org/>.

Sumber Peraturan Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK No.04/ 2018 tentang Pelunasan Cukai.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 128/ 2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.04/2012 tentang Dokumen Cukai dan/ atau Dokumen Pelengkap Cukai.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 140 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2020.
- Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-20/BC/2018 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minimum yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2019
- Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-28/BC/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-34/BC/2013 tentang Pengolahan Kembali atau Pemusnahan Barang Kena Cukai yang Dibuat di Indonesia dalam Rangka Pengembalian Cukai.
- Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-29/ BC/2018 tentang Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Negara di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-35/BC/2016 tentang Pedoman Penataan, Monitoring dan Evaluasi Organisasi Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-50/NC/2012 tentang Perubahan kedua atas peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-19/BC/2008 tentang Pengembalian cukai atas Barang Kena Cukai yang Diolah Kembali atau Dimusnahkan.

Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-53/PK/2019 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2020.